

TA
2021



LAPORAN KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

Pusat Pemerintahan Kabupaten Sinjai
Jalan Persatuan Raya No. 98

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2018 – 2023. LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018 - 2023).

LKj Dinas Perikanan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Perikanan Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perikanan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perikanan Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perikanan Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perikanan pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perikanan Tahun

2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama, ada 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, dimana kita tahu tahun 2021 masih ada pemotongan anggaran karena masih adanya pandemi dan ada beberapa kegiatan yang dikurangi anggarannya. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perikanan Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, Januari 2021
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sinjai,

H.HARIS ACHMAD, ST, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perikanan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perikanan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Perikanan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Perikanan tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan Kab. Sinjai.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu : Volume produksi perikanan dengan didukung beberapa kegiatan yaitu Pengadaan Kapal penangkapan ikan, Pengadaan alat bantu penangkapan ikan, Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Nelayan, jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pembangunan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD) BBI.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perikanan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perikanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
Struktur Organisasi	5
Komposisi SDM Organisasi	6
BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA	11
Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan	11
Program untuk Pencapaian Sasaran	12
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
Rencana Anggaran Tahun 2021	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
Capaian Kinerja Organisasi	16
Capaian Indikator Kinerja Utama 2021	18
Perbandingan Capaian Kinerja	19
Realisasi Anggaran	19
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Anggaran	28
BAB IV PENUTUPAN	31
Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	31
Strategi Peningkatan Kinerja	31

DAFTAR TABEL

Table1.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perikanan Tahun 2021	4
Table 1.2	Komposisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Golongan	7
Table 1.3	Komposisi Sumberdaya Pegawai menurut Bidang	8
Table 1.4	Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan	9
Table 1.5	Komposisi PNS menurut Diklat PIM tahun 2021	10
Table 1.6	Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural	10
Table 2.1	Program untuk Pencapaian Sasaran tahun 2021	12
Table 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan tahun 2021	13
Table 2.3	Rencana Belanja Dinas Perikanan TA 2021	14
Table 2.4	Alokasi per Sasaran tahun 2021	14
Table 3.1	Perbandingan antara Target dan Realisasi	16
Table 3.2	Tabel Pencapaian Indikator tahun 2021	18
Table 3.3	Perbandingan Capaian 2020 dan Target RENSTRA	19
Table 3.4	Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021	20
Table 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran 1	23
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021	23
Table 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Indikator 1	25
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Indikator 2	26
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Indikator 3	26
Table 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 3	27
Table 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 4	27
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021	28
Table 3.13	Tingkat Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021	29
Tabel 3.14	Tingkat Efektivitas Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021	30

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Sinjai	6
2. Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kab.Sinjai	7
3. Jumlah PNS berdasarkan Bidang dan UPTD Dinas Perikanan Sinjai	8
4. Persentase PNS menurut Jenjang Pendidikan	9
5. Perimbangan PNS & Jenis Kelamin menurut Jenjang Pendidikan	9

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perikanan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Perikanan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perikanan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan

solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perikanan

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka bagian Sekretariat mempunyai fungsi: 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas; 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan; 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; 4) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian dan; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Budidaya, Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan, Sarana dan prasarana budidaya . Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Pelaksanaan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas ; 2) Perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya , Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan dan Sarana dan prasarana budidaya.; 3) Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya : 4) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan budidaya, pengendalian dan kesehatan lingkungan, budidaya; 5) pelaksanaan evaluasi dan

laporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

Bidang Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan sebagian tugas dinas, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan yang meliputi seksi Pengembangan Sumberdaya manusia, Bina Usaha Teknologi, Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan, maka Bidang usaha dan kelembagaan melaksanakan fungsi : 1) perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya sesuai rencana dan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 2) Pembinaan Pengembangan sumberdaya manusia; 3) Kegiatan bina usaha dan teknologi; 4) Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumberdaya manusia; 5) Menyusun SOP ; 6) Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan; 7) Menyusun rencana kelembagaan dan penyuluhan; dan 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan meliputi pengelolaan pesisir, data dan informasi, serta sarana dan prasarana perikanan tangkap, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut : 1). perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya sesuai rencana dan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas, 2). perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pesisir, data dan informasi dan sarana dan prasarana perikanan tangkap, 3). perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan pesisir, data dan informasi serta sarana dan prasarana perikanan tangkap, 4). pelaksanaan penyiapan rekomendasi untuk penribitan surat izin, 5). pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan dan pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan, 6). pelaksanaan pembinaan, pengelolaan pesisir, data dan informasi, serta sarana dan prasarana perikanan tangkap, 7). pelaksanaan evaluasi dan administrasi bidang pengelolaan perikanan tangkap dan 8). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Lappa dan Tempat Pelelangan Ikan Pembantu Tongke-Tongke. Dalam melaksanakan tugas dalam pengelolaan Tempat

Pelelangan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan; 2) menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan; 3) mengawasi dan mengendalikan pengelolaan tempat pelelangan ikan; 4) memberikan pelayanan umum di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan; 5) melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPT; dan 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Tassilulu dan Balai Benih Ikan (BBI) Palangka Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan benih ikan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Membantu menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Balai Benih Ikan 2). Pembinaan dan Pengawasan Internal 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan, 4) Menyusun rencana anggaran untuk kegiatan UPTD, 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan beberapa indikator kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perikanan Tahun 2021

No	Rincian	Target
1 .	Presentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	90
1 .	Volume Produksi Perikanan (Ton)	85.416
2 .	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	17,79
3 .	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita	47
4 .	Produksi Perikanan kelompok nelayan (%)	22,85
5 .	Jumlah Produk Hasil olahan	1.505

Adapun indikator sasaran dalam pelayanan merupakan bagian dari indikator kinerja utama dengan fokus kepada arahan teknis dan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi dinas yang terdiri dari atas 3 bidang teknis, 1 bidang sekretariat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3) Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - a. Seksi Budidaya
 - b. Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
- 4) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Data dan Informasi
 - c. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap
- 5) Bidang Usaha dan Kelembagaan membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Seksi Bina Usaha dan Teknologi
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan :
 - a. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - b. UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

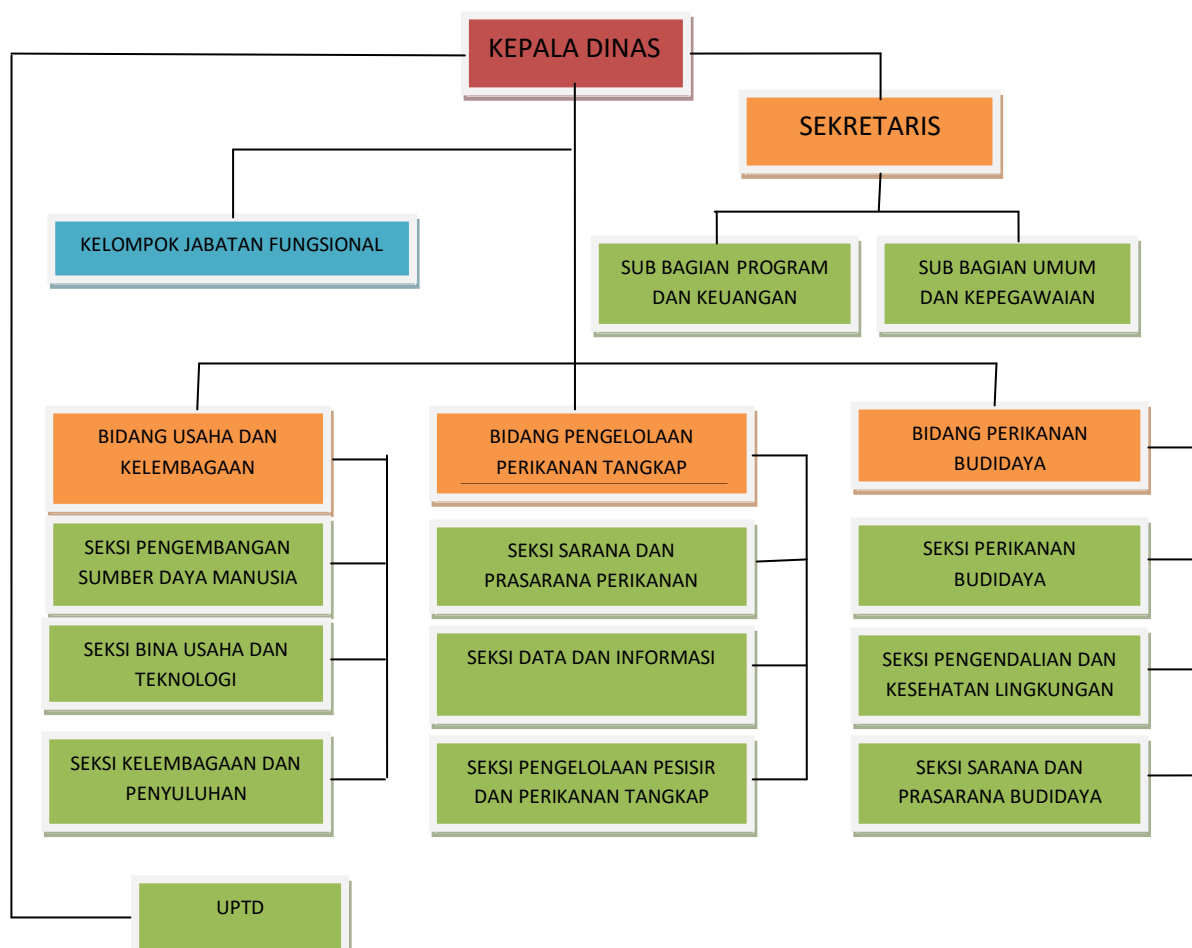
Adapun Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Sinjai seperti terlihat berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI

Perda Kabupaten Sinjai

Nomor : 5 Tahun 2016

Tanggal : 29 Nopember 2016



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Sinjai

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

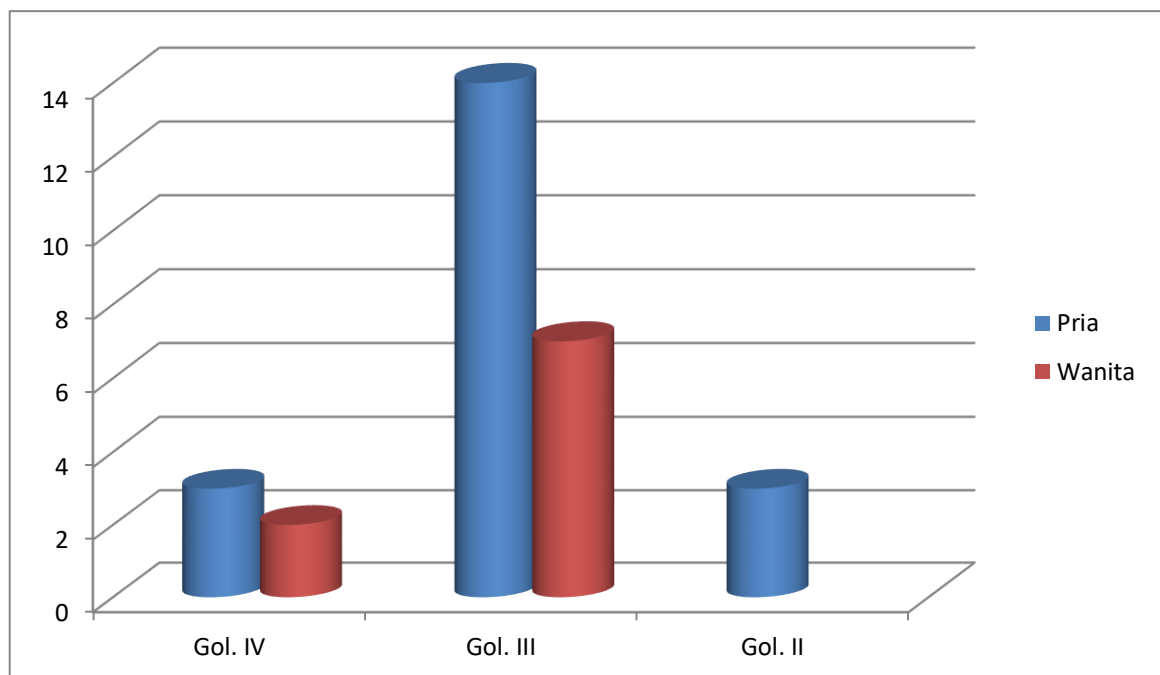
Dinas Perikanan Kab. Sinjai pada awal tahun 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 31 orang, sampai pada akhir tahun 2021 jumlah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sebanyak 31 orang dengan perincian : 13 orang merupakan pejabat struktural dan 15 orang merupakan fungsional umum.

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Pegawai Dinas Perikanan memiliki jumlah pegawai laki-laki sebanyak 21 orang dan pegawai perempuan sebanyak 10 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel.1.2 Komposisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/c	-	-	-
2	Golongan IV/b	1	-	1
3	Golongan IV/a	3	2	5
4	Golongan III/d	7	3	10
5	Golongan III/c	4	4	8
6	Golongan III/b	3	-	3
7	Golongan III/a	-	-	-
8	Golongan II/d	1	-	1
9	Golongan II/c	1	1	2
10	Golongan II/b	1	-	1
11	Golongan II/a	-	-	-
Jumlah		21	10	31

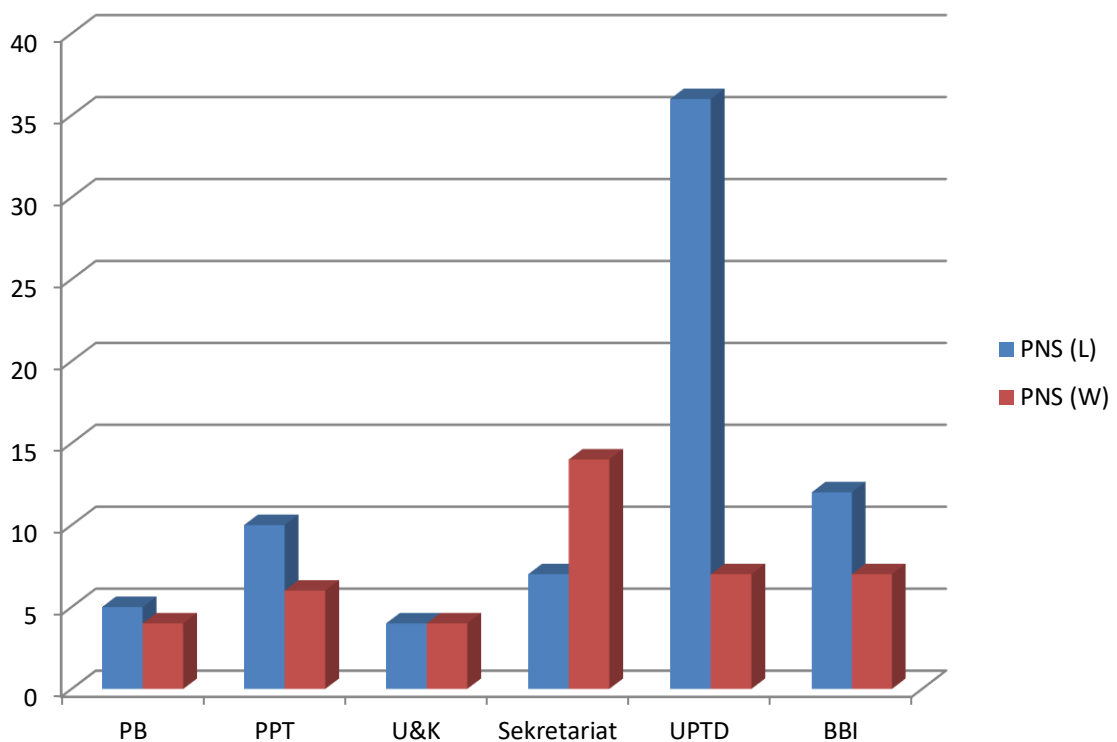


Gambar 2. Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kab. Sinjai

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai terdiri atas Sekretariat , 3 bidang, dan 2 UPTD . Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel. 1.3 Komposisi Sumberdaya Pegawai menurut Bidang

No	Bidang/Unit	PNS		Jumlah	Kontrak		Jumlah
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	Perikanan Budidaya	3	1	4	4	1	5
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	5	2	7	1	1	2
3	Usaha dan Kelembagaan	6	1	7	3	2	5
4	Sekretariat	1	5	6	5	13	18
5	UPTD TPI	4	-	4	34	9	43
6	BBI Palangka	-	1	1	5	2	7
7	BBI Tassililu	2	-	2	5	3	8
	Jumlah	21	10	31	57	31	88



Gambar 3. Jumlah PNS berdasarkan Bidang dan UPTD Dinas Perikanan Sinjai

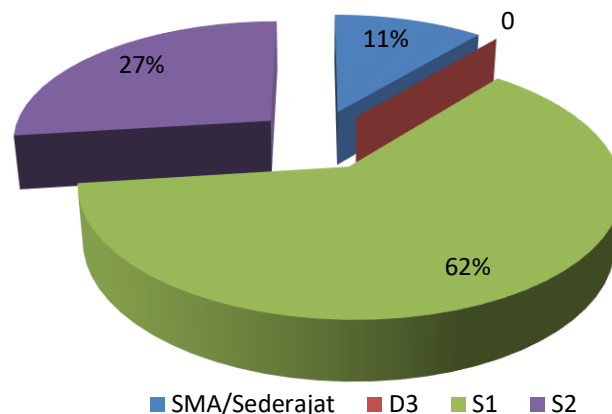
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 tercatat sebanyak 31 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Magister Sains (S2) sebagai berikut :

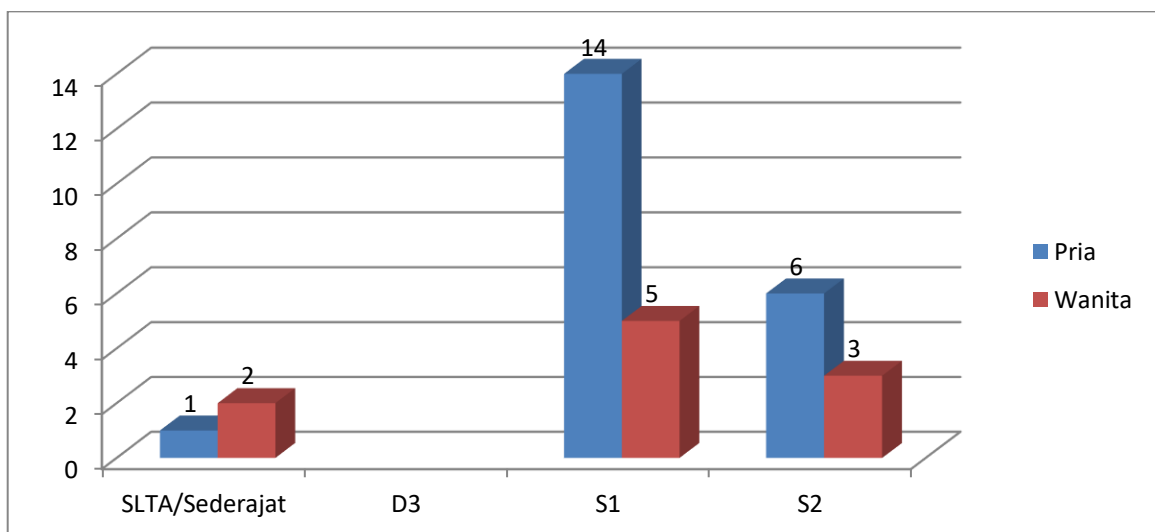
Tabel 1.4 Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S2	6	3	9
2	S1	14	5	19
3	Sarjana Muda	-	-	-
4	SLTA	1	2	3
	Jumlah	21	10	31

Persentase Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 4 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 5 Perimbangan PNS Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2019.

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sejak tahun 2021 sebanyak 17 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II sebagai berikut :

Tabel 1.5 Komposisi PNS menurut Diklat PIM Tahun 2021

No	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II	1	-	1
2	Diklat PIM III	-	2	3
3	Diklat PIM IV	7	3	10
	Jumlah	8	5	13

Tabel 1.6 Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	7	4	11
	Jumlah	9	6	15

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis SKPD Dinas Perikanan untuk periode 5 tahun. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMDP, Perubahan RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai membuat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Perikanan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perikanan telah membuat Perjanjian Kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, dan mengikuti tahapan pengalokasian dana.

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Kegiatan :	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	16.140.000.-
	b. Evaluasi kinerja perangkat daerah	16.548.600.-
	Kegiatan :	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.164.819.730.-
	b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan	47.414.000.-
	c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	920.000.-
	d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	57.522.000,-
	Kegiatan :	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
	Sub Kegiatan :	
	a.Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.050.800,-
	b.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.920.000,-
	c.Penyediaan pelayanan umum kantor	68.658.450,-
	Kegiatan :	
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah.	
	Sub Kegiatan :	
	a. Penyediaan Jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional lapangan.	65.709.850,-
II	Program Perikanan Tangkap	
	Kegiatan :	
	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	12.050.000.-
	b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	644.850.000,-
	Kegiatan :	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI).	
	Sub Kegiatan :	

	a. Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	129.677.600,-
III	Program Pengaelolaan Perikanan Budidaya	
	Kegiatan :	
	Pengelaolaan Pembudidayaan Ikan	
	Sub Kegiatan :	
	a.Penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.	19.200.000,-
	a.Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota.	1.042.549.999,-
V.	Program Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Kegiatan :	
	Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolah Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	
	Sub Kegiatan :	
	a.Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	196.850.000,-
	Total Anggaran	5.512.881.029,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada Perubahan RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Dinas Perikanan telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capain Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presentase capain kinerja program perangkat daerah	%	100
Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Volume produksi perikanan	Ton	85.934,51
	Produksi perikanan kelompok Nelayan	%	24,98
	Jumlah produk olahan hasil perikanan	Ton	1.509
Meningkatnya komsumsi ikan	Jumlah konsumsi ikan per kapita	Kg/kap/thn	47
Peningkatan peresentase pembinaan kelompok nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan	%	17,84

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 5.512.881.029,- yang digunakan untuk membiayai Belanja operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Rencana Belanja Dinas Perikanan TA 2021

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Operasi	5.239.681.030,00,-	95,04
2	Belanja Modal	273.199.999,00,-	4,96
Jumlah		5.512.881.029,00,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Presentase capain kinerja program perangkat daerah	3.467.703.430,00,-	62,90
1.	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Volume Produksi Perikanan	786.577.600,00,-	14,27
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		1.061.749.999,00,-	19,25
3.	Meningkatnya pengelolaan hasil dan pemasaran produk perikanan		196.850.000,00,-	3,58
Total 5.512.881.029,00,-				100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 2.348.061.299,- dan yang digunakan Rp. 2.273.101.740,- dengan prosentase anggaran tersebut untuk mendukung sasaran Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan, sarana dan prasarana perikanan, serta pengelolaan hasil dan

pemasaran produk perikanan dan pengembangan budidaya perikanan dengan besaran 96.80 %. Dan untuk realisasi kinerja 100 %.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Presentase capain kinerja program perangkat daerah	%	90	90	100

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan presentase capaian kinerja program perangkat daerah dengan target 90 %, realisasi 100 %, sehingga capaian untuk indikator kinerja mencapai 100 % sesuai dengan yang telah ditergetkan, tercapainya semua ini tidak lepas dari partisipasi dan kerja sama semua pegawai di Dinas Perikanan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Volume produksi perikanan	Ton	85.416	85.934,51	101
	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	22,85	24,98	109
	Jumlah produk olahan hasil perikanan	Ton	1.505	1.509	100,3

Sasaran strategis Meningkatnya produksi komoditi perikanan dengan indikator kinerja ada 3 yaitu : 1. Volume produksi perikanan dengan target 85.416 ton, dengan realisasi 85.934,51 ton atau 101 %, 2. Produksi perikanan kelompok nelayan dengan target 22,85 % realisasi 24,98 % atau 109 %, 3. Jumlah produk hasil olahan hasil perikanan dengan target 1.505 ton dengan realisasi 1.509 ton atau 100, 3 %, dari 3 indikator semua melebihi target yang telah ditetapkan, adapun Program yang mendukung kegiatan ini yaitu Program Pengelolaan Perikanan tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang didukung dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK).

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Komsumsi ikan	Jumlah komsumsi ikan perkapita	Kg./Kap/thn	47	47	100

Sasaran strategis meningkatnya Komsumsi ikan dengan indikator kinerja jumlah komsumsi ikan perkapita dengan target 47 kg/kap/thn. Dengan realisasi 47 kg/kap/thn. Atau 100 %, capaian sesuai dengan target.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan presentase pembinaan kelompok nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan	%	17,79	17,84	100,2

Sasaran Strategis peningkatan presentase pembinaan kelompok nelayan dengan indikator kinerja Cakupan bina kelompok nelayan dengan target 17,79 %, dengan realisasi 17,84 % atau 100,2 %, capaian ini melebihi target yang telah ditentukan, dan ini didukung partisipasi dan kerjasama semua pegawai dan penyuluh dalam melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

b. Capaian Indikator Kinerja 2021

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan untuk tahun 2021. Pencapaian Indikator tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capain Kinerja	
		2020	2021
1	Presentase capain kinerja program perangkat daerah	-	90
2	Volume produksi perikanan (Ton)	83.045,71	85.934,51
3	Konsumsi Ikan perkapita (kg/Kap.Thn)	47	47
4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	17,79	17,84
5	Produksi Perikanan kelompok nelayan (%)	22,41	24,98
6	Jumlah produk hasil olahan perikanan (Ton)	1.476	1.509

Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan pada tahun 2021, dari 6 (enam) indikator, 4 (empat) indikator melebihi 100 %, dan semua mencapai target, meskipun masih ada pemotongan anggaran namun target untuk IKU Dinas Perikanan tahun 2021 tercapai. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

c. Perbandingan Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan terget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata rata realisasi sampai dengan tahun tahun ini	Capaian (%)
1.	Presentase capain kinerja program perangkat daerah	%	90	90	100
2.	Volume produksi perikanan	%	85,416	85.934,51	101
3.	Jumlah konsumsi ikan per kapita	Kg/Kap/Thn	47	47	100
4.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	17,79	17,84	100,2
5.	Produksi perikanan kelompok Nelayan	%	22,85	24,98	109,3
6.	Jumlah produk olahan hasil perikanan	Ton	1.505	1.509	100,3

d. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 95,76% dari total anggaran yang dialokasikan.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran rendah. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih sudah seimbang dengan realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya efesiensi anggaran kecil.

Tabel 3.8 Realisasi anggaran kegiatan tahun 2021

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Kegiatan :			
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan :			
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	16.140.000.-	16.140.000,-	0,29
	b. Evaluasi kinerja perangkat daerah	16.548.600.-	16.548.600,-	0,30
	Kegiatan :			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan :			
	a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.164.819.730.-	3.005.945.990,-	54,53
	b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan	47.414.000.-	47.365.918,-	0,86
	c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	920.000.-	915.000,-	0,02
	d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	57.522.000,-	57.052.800,-	1,03
	Kegiatan :			
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Sub Kegiatan :			
	a.Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.050.800,-	25.071.382,-	0,45
	b.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.920.000,-	2.920.000,-	0,05
	c.Penyediaan pelayanan umum kantor	68.658.450,-	68.658.450,-	1,25
	d. Penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	65.709.850,-	65.088.590,-	1,18
II.	Program Perikanan Tangkap			

	Kegiatan :			
	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan :			
	a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	12.050.000,-	12.050.000,-	0,22
	b. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	644.850.000,-	629.622.200,-	11,42
V	Kegiatan :			
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI).			
	Sub Kegiatan :			
	a. Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	129.677.600,-,-	129.620.800,-	2,35
	Program Pengaelolaan Perikanan Budidaya			
	Kegiatan :			
	Pengelaolaan Pembudidayaan Ikan			
	Sub Kegiatan :			
	a.Penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.	19.200.000,-	19.167.500,-	0,35
	a.Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota.	1.042.549.999,-	986.140.500,-	17,88
	Program Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Hasil Perikanan			
	Kegiatan :			
	Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolah Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.			
	Sub Kegiatan :			
	a.Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1	196.850.000,-	196.740.000,-	3,57

	(satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
	Total Anggaran	5.512.881.029,-	5.279.047.730,-	95,76

e. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2023.

Capaian kinerja sasaran yang melebihi/melampaui atau mencapai target ditunjukkan pada

- a. Indikator Volume Produksi Perikanan sebesar 85,416 Ton dengan capaian kinerja 85.934,51 Ton.
- b. Indikator Produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 22,85% dengan capaian kinerja 24,98 %.
- c. Indikator Jumlah produk olahan hasil perikanan sebesar 1.505 Ton dengan capaian kinerja 1.509 Ton.
- d. Indikator Cakupan bina kelompok nelayan sebesar 17,79% dengan capaian kinerja 17,84 %.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas yang melebihi target dan sesuai target yang dirangkum pada tabel berikut : Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIA N
1	Melebihi/Melampaui Target	66.67 %
2	Sesuai Target	33.33

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023,

analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Dinas Perikanan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10. Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	90	90	100	90	-	-	95	-	-

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase capaian kinerja program perangkat daerah" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Diperlukan data realisasi anggaran masing-masing Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 sebagai bahan analisis dalam mengukur capaian kinerja keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai masing-masing indikator sasaran dengan pagu anggarannya. Adapun data realisasi tersebut dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Table 3.11. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Keu (%)	Fisik (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.467.703.430	3.305.706.730	161.996.700	95,33	100
A.	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	32.688.600	32.688.600	0	100	100
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	16.140.000	16.140.000	0,00	100,00	100
2	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	16.548.600	16.548.600	0	100	100
B.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.212.233.730	3.053.311.908	158.921.822	95,05	100
1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.164.819.730	3.005.945.990	158.873.740	94,98	100
2	Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	47.414.000	47.365.918	48.082	99,90	100
C	Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	58.442.000	57.967.800	474.200	99,19	100
1	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	920.000	915.000	5.000	99,46	100

2	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	57.522.000	57.052.800	469.200	99,18	100
D	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98.629.250	96.649.832	1.979.418	97,99	100
1.	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	27.050.800	25.071.382	1.979.418	92,68	100
2.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.920.000	2.920.000	0	100	100
3	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	68.658.450	68.658.450	0	100	100
E.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	65.709.850	65.088.590	621.260	99,05	100
1	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	65.709.850	65.088.590	621.260	99,05	100
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	786.100.000	771.293.000	16.807.000	98,12	100
A.	Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah kabupaten/kota	786.100.000	771.293.000	16.807.000	98,12	100
1	Sub kegiatan Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	12.050.000	12.050.000	0	100	100
2	Sub kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	644.850.000	629.622.200	15.227.800	97,64	100
B	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	129.677.600	129.620.800	56.800	99,96	100
1	Sub kegiatan Peleayanan penyelenggaraan TPI	129.677.600	129.620.800	56.800	99,96	100
III	Program Pengelolaan perikanan Budidaya	1.061.749.999	1.005.308.000	56.441.999	94,68	100
A	Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan	1.061.749.999	1.005.308.000	56.441.999	94,68	100
1	Sub kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	19.200.000	19.167.500	32.500	99,83	100
2	Sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah (Pengembangan BBI)	32.300.000	32.300.000	0	100	100
3	Sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 kabupaten/kota (pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil)	1.010.249.999	953.840.500	56.409.499	94,42	100
IV	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	196.850.000	196.740.000	110.000	99,94	100
A	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	196.850.000	286.000.000	0	100,00	100
1.	Sub kegiatan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota	196.850.000	794.199.116	5.800.884	99,27	100

Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan

Tabel 3.12. Analisis Pencapaian Sasaran 2, indicator 1 Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Volume Produksi Perikanan	Ton	85.416	85.934,51	100,6	88.430	-	-	92.074	-	-

Sasaran Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu volume produksi perikanan, Produksi perikanan kelompok nelayan dan jumlah produk olahan hasil perikanan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Volume Produksi Perikanan" adalah sebesar 100,6% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,6 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan.

Produksi perikanan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan. Tindak lanjut dari pengukuran kinerja ini tetap akan dilanjutkan untuk melihat tingkat keberhasilan capaian produksi perikanan dari tahun ke tahun. Karena bidang perikanan merupakan sektor primer yang masih menjadi sumber mata pencaharian masyarakat kabupaten sinjai. Di samping itu bidang perikanan merupakan pendukung ketahanan pangan masyarakat yang harus digiatkan. Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Volume Produksi Perikanan " tahun ini adalah sebesar 85.934,51 Ton. Realisasi tahun 2021 sebesar 85.934,51Ton bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perikanan sebesar 424.785 Ton maka capaian kinerja tahun 3 dari target akhir sampai dengan tahun 2023 mencapai 248.783,82 Ton. Tahun 2021 telah tercapai produksi ikan sebesar 85.934,51 Ton atau perlu penambahan sebesar 176.001,18 Ton produksi ikan untuk dapat mencapai target di Tahun 2023 nanti.

Sasaran 2

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Pencapaian sasaran 2, Indikator 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.13. Analisis Pencapaian Sasaran 2, indikator 2 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	21,98	24,98	109,3	23,31	-	-	23,78	-	-

Sasaran Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan juga dapat dilihat dari indikator produksi perikanan kelompok nelayan. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Produksi Perikanan Kelompok Nelayan". adalah sebesar 109,3 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109,3 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja indikator 2 "Produksi Perikanan Kelompok Nelayan " tahun ini adalah sebesar 24,98%. Realisasi tahun 2021 sebesar 24,98% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perikanan sebesar 23,78% maka capaian kinerja tahun 3 dari target akhir sampai dengan tahun 2023 sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

Sasaran 2
Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan

Pencapaian sasaran 2, Indikator 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14. Analisis Pencapaian Sasaran 2, Indikator 3 Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	ton	1.505	1.509	100,3	1.535	-	-	1.565	-	-

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan" adalah sebesar 1.509 Ton dari target sebesar 1.505 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,3%, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan. Dari informasi yang diperoleh dari tingginya

jumlah produk olahan hasil perikanan, disebabkan karena semakin banyaknya kelompok yang melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan, baik berupa pemasaran maupun pengolahan.

Sasaran 3

Meningkatnya Konsumsi Ikan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15. Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Konsumsi Ikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah konsumsi ikan per kapita	Kg/kapita/thn	47	47	100	48	-	-	48	-	-

Capaian kinerja nyata indikator "Jumlah konsumsi ikan per kapita" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dengan informasi yang diperoleh dari tingginya produksi komoditi perikanan, sehingga kebutuhan masyarakat akan pemenuhan konsumsi ikan juga lebih besar. Hal ini berdampak pada tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Kabupaten Sinjai. Tingkat konsumsi ikan yang ada saat ini lebih didominasi oleh konsumsi ikan segar yang ada di pasar.

Sasaran 4

Peningkatan Persentase Pembinaan Kelompok Nelayan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.16. Analisis Pencapaian Sasaran 4 Peningkatan Persentase Pembinaan Kelompok Nelayan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Bina Kelompok nelayan	%	17,79	17,84	100,2	18,14	-	-	18,50	-	-

Capaian kinerja nyata indikator "Cakupan bina kelompok nelayan" adalah sebesar 100,2% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2021. Tingginya capaian bina kelompok nelayan yang diperoleh disebabkan karena banyaknya kelompok yang mendapatkan bantuan, baik kelompok pembudidaya (Pokdakan), kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk penangkapan maupun kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar).

f. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Anggaran yang digunakan adalah :

1. Mengukur capaian kinerja keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai masing-masing indikator sasaran dengan pagu anggarannya. Realisasi anggaran untuk masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata 99,92%. Anggaran yang tidak diserap pada umumnya merupakan sisa anggaran belanja barang dan jasa karena menyesuaikan dengan penawaran pihak ketiga. Termasuk dalam penyediaan listrik, dan air, pajak kendaraan dinas terdapat efisiensi anggaran sesuai pemakaian masing-masing. pada Pada Tahun 2021 seluruh realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan mencapai 100%, tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan. Untuk melihat rincian capaian kinerja keuangan masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut :

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		%
	PAGU	REALISASI	Capaian Kinerja Keuangan
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.467.703.430	3.305.706.730	95,33
Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan	447.227.599	446.867.300	99,92
Sasaran 3 : Meningkatnya Konsumsi ikan	196.850.000	196.740.000	99,94
Sasaran 4 : Peningkatan persentase pembinaan kelompok nelayan	1.401.100.000	1.329.733.700	94,91

2. Mengevaluasi hasil pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran. Apakah penggunaan anggaran sudah digunakan seefisien mungkin dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

bahwa untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap realisasi anggaran, maka dihitung nilai efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi (\%)} = \frac{\% \text{ capaian kinerja sasaran} - \% \text{ capaian kinerja}}{\% \text{ capaian kinerja}}$$

$$\text{Tingkat efektivitas (\%)} = \frac{\% \text{ capaian}}{\text{target kinerja}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas dari masing- masing capaian indikator kinerja sasaran maka digunakan rumus di atas, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.18. Tingkat Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Keuangan(%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	4-5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase capaian program perangkat daerah	100	95,33	4,67
2	Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan	Jumlah Produksi Komoditi perikanan	100,6	99,92	0,68
3	Meningkatnya Konsumsi ikan	Konsumsi Ikan per Kapita	100	99,94	0,06
4.	Peningkatan persentase pembinaan kelompok nelayan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	100,2	94,91	5,29

Dari Tabel 3.18 diperoleh hasil bahwa seluruh Sasaran Strategis Dinas Perikanan dengan indikator kinerjanya tercapai melalui pelaksanaan Program Kegiatannya secara efisien. Dikatakan efisien apabila tingkat efisiensi dalam mencapai sasarnya bernilai sama dengan atau lebih dari 0%. Tidak terjadi pemborosan anggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perikanan. Sedangkan efektif atau tidaknya Program Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai masing-masing sasarnya dilihat dari Tabel 3.19 ini sudah termasuk dalam kategori efektif atau

tepat sasaran.

Tabel 3.19. Tingkat Efektivitas Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Capaian Kinerja Keuangan(%)	Tingkat Efektifitas (%)
1	2	3	4	5	$4/5 \times 100\%$
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase capaian program perangkat daerah	100	95,33	104,90
2	Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan	Jumlah Produksi Komoditi perikanan	100,6	99,92	100,68
3	Meningkatnya Konsumsi ikan	Konsumsi Ikan per Kapita	100	99,94	100,06
4.	Peningkatan persentase pembinaan kelompok nelayan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	100,2	94,91	105,57

Dari evaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas, masing-masing Program Kegiatan Dinas Perikanan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan harapan target sasaran. Dianggap efektif bila tingkat efektivitasnya sama dengan atau lebih dari 100%.

- Ketiga adalah menganalisis hasil dari pengukuran capaian kinerja sasaran, capaian kinerja anggaran (realisasi anggaran) dan nilai efisiensinya

Program yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, meningkatnya produksi komoditi perikanan, meningkatnya konsumsi ikan dan peningkatan persentase pembinaan kelompok nelayan sudah cukup efisien penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalamnya, masing-masing 1,03%, 0,68%, 0,06% dan 5,29%.

BAB IV

PENUTUP

A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan

Secara keseluruhan realisasi rata-rata capaian kinerja kegiatan Dinas Perikanan pada tahun 2021 sebesar 100%.

Seluruh capaian kinerja utama dan kinerja pendukung Dinas Perikanan dihasilkan dengan dukungan dana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp 5.279.047.730 atau 95,76% dari anggaran setelah penghematan sebesar Rp 5.512.881.029
2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 30 orang atau 96,77% dari rencana sebanyak 31 orang, dikarenakan 1 orang pensiun dan kekosongan jabatan Kepala UPTD TPI untuk 1 orang.

Dengan terlaksananya seluruh Program Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2021, dan pencapaian kinerjanya, maka diharapkan tujuan Dinas yaitu meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dapat tercapai.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Prestasi capaian kinerja yang melebihi target tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam bentuk Program Kegiatan yang lebih fokus dan mengikuti perkembangan tantangan perubahan struktur ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi dari Kegiatan yang lebih mengutamakan sektor Primer ke arah sektor sekunder/industri atau jasa perlu diantisipasi Dinas Perikanan untuk lebih inovatif dalam penyusunan Kegiatan.

Dinas Perikanan akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga keinginan menjadi pembuat kebijakan dan pengembangan perikanan yang terpercaya sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dapat terwujud.

Strategi yang akan terus dijalankan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, pada perencanaan tahun mendatang antara lain :

- ✓ Mengembangkan Kampung Nila di lokasi yang berpotensi seperti Kelurahan Balakia Kecamatan Sinjai Barat
- ✓ Pembangunan Pasar Benih sebagai pembuka peluang pasar yang lebih luas di dalam Kabupaten Sinjai

- ✓ Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan usaha budidaya ikan berupa bantuan sarana, prasarana dan penyuluhan berkelanjutan.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan soliditas sumberdaya manusia dalam kerja demi mencapai kinerja yang lebih baik, terukur dan saling bersinergi.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presentase capaian kinerja Program perangkat daerah (%)	90	90	100
2.	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Volume produksi perikanan (Ton)	85.416	85.934,51	100,6
		Produksi perikanan kelompok Nelayan (%)	22,85	24,98	109,3
		Jumlah produk olahan hasil perikanan (Ton)	1.505	1.509	100,3
3.	Meningkatnya konsumsi ikan	Jumlah konsumsi ikan per kapita (Kg/Kap/Thn)	47	47	100
4.	Peningkatan persentase pembinaan kelompok nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan	17,79	17,84	100,2

LAMPIRAN 2

Produksi Perikanan Menurut Sektor Perikanan Tahun 2021

Jenis Perairan	Tahun	
	2021	
	Target	Realisasi
Jumlah	85.416	85.934,51
Perikanan Tangkap (ton)	37.707	37.760,20
Perikanan Budidaya (ton)	47.709	48.174,31

LAMPIRAN 3

Volume Produksi Perikanan Menurut Usaha Budidaya Tahun 2021

Jenis Usaha Budidaya	Tahun
	2021
Tambak	27.478,84
Kolam	94,94
Sawah	133,71
Budidaya Laut	20.466,82
T O T A L	48.174,31

LAMPIRAN 4

Volume Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2021

Jenis Ikan	Tahun
	2021
Mujair	-
Bandeng	85,35
Kakap	-
Udang Windu	15,25
Udang Api-api	-
Rumput Laut	27.356,95
Venamae	21,29
Mas	16,3
Nila	24,91
Udang Galah	-
Lele	53,73
Mas	20,84
Nila	112,87
Rumput Laut	20.466,82
T O T A L	48.174,31

LAMPIRAN 5

Jenis dan Jumlah Alat Tangkap, Estimasi Trip Penangkapan, Produksi dan Nilai Produksi Tahun 2021

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (Unit)	Estimasi (Jumlah)		
			Trip	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.000)
1	Purse Seine (Gae)	269	9.240	13.935,20	178.615.800
2	Jaring Insang Hanyut	248	117.435	1.794	35.151.612
3	Jaring Insang Tetap	281	102.218	1.364	28.948.600
4	Bagan Perahu	150	3.440	897	12.251.000
5	Bagan Tancap	-	-	-	-
6	Pole And Line (Huhate)	-	-	-	-
7	Pancing Tonda	1.098	34.848	17.403	299.952.661
8	Pancing Ulur	220	29.072	1.390	28.149.567
9	Pancing Tegak	-	-	-	-
10	Pancing Cumi	350	24.464	394	7.997.525
11	Pancing Rawai	88	-	-	-
12	Bubu	193	33.030	455	12.662.500
13	Alat penangkap Kepiting	-	-	-	-
14	Alat Pengumpul Teripang	30	7.320	128	35.151.612
15	Panah	13	-	-	-
TOTAL		2.940	361.067,00	37.760,20	638.880.877

